

RANCANGAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
PERUBAHAN I



BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang menjelaskan bahwa Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini merupakan dokumen Rencana Kerja 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Tujuan Penyusunan Renja PD ini adalah acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan tahunan Perangkat Daerah serta menyediakan indikator – indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

- (1) menetapkan indikator sasaran yang hendak dicapai dalam rumusan teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022;
- (2) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang (2019);
- (3) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Adapun Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan Secara Singkat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan,

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Bab V : PENUTUP

Berisi uraian penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Dari jumlah program utama sebanyak 6 (enam) program pembangunan dengan jumlah kegiatan total sebanyak 55 (lima puluh lima) kegiatan, presentase fisik pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan sebesar 100 % dengan presentase realisasi anggaran sebesar 91.23 % sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk fisiknya sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar 93.06 %, Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk fisiknya sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 87.58 %, Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk fisiknya sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 90.54 %, Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota untuk fisiknya sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 92.69 %, Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah untuk fisiknya sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 83.11 %, Capaian Program Peningkatan Pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain untuk fisiknya sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 90.90 % .

Tahun 2017 merupakan tahun akhir Rencana Strategis Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sekaligus merupakan bagian evaluasi Rencana Strategis Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022.

Ratio capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata mencapai 100 %, terkecuali untuk Indikator Kinerja Utama pertama, yaitu “Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang hanya tercapai sebesar 66.67% dalam 4 (empat) tahun terakhir (2013-2016), sedangkan untuk tahun 2017 masih menunggu hasil Pemeriksaan BPK.

Belum fokusnya pencapaian Hasil Program dikarenakan masih terjadinya tumpang tindih keluaran kegiatan yang ingin dicapai terhadap pencapaian hasil program yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana digambarkan pada Tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Badan Keuangan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2018			
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6			7		8=7/6		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
						BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN,																
20	06	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	840,00	10.405.968.937	168,00	10.721.930.481	276,00		12.781.17.000	276	11.894.437.381	100%	93,06 %	444,00	22.616.367.862	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya, perangkat, materai dan benda pos lainnya, paket/pengiriman	60,00	375.570.932,00	12,00	130.755.125	12,00	bulan	105.910.000	12,00	102.470.130	100%	96,75 %	24,00	233.225.255	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi	60,00	722.796.888,00	12,00	557.712.317	12,00	bulan	948.600.000	12,00	932.728.319	100%	98,33 %	24,00	1.490.440.636	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan	60,00	358.209.634,20	12,00	747.030.000	12,00	bulan	548.580.000	12,00	538.777.500	100%	98,21 %	24,00	1.285.807.500	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya operasional kebersihan kantor	60,00	1.863.823.896,88	12,00	129.901.900	12,00	bulan	58.740.000	12,00	58.722.000	100%	99,97 %	24,00	188.623.900	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	05	01	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	terpeliharanya peralatan kerja	60,00	1.669.873.398,60	12,00	598.480.270	12,00	bulan	512.335.000	12,00	178.973.800	100%	34,93 %	24,00	777.454.070	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022

20	06	01	01	11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	60,00	1.506.889.786,60	12,00	612.080.140	12,00	bul an	390.845.000	12,00	390.078.500	100%	99,80 %	24,00	1.002.158.640	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60,00	2.014.973.481,40	12,00	1.023.597.575	12,00	bul an	1.093.632.000	12,00	1.069.877.500	100%	97,83 %	24,00	2.093.475.075	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	13	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	60,00	212.587.320,00	12,00	52.060.820	12,00	bul an	30.000.000	12,00	7.364.000	100%	24,55 %	24,00	59.424.820	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya surat kabar dan majalah sebagai sarana informasi	60,00	87.160.801,20	12,00	45.285.000	12,00	bul an	28.480.000	12,00	27.370.000	100%	96,10 %	24,00	72.655.000	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	60,00	-	12,00	175.019.671	12,00	bul an	115.000.000	12,00	105.958.300	100%	92,14 %	24,00	280.977.971	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	18	Penyediaan Makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat	60,00	165.109.485,20	12,00	46.745.050	12,00	bul an	70.338.000	12,00	49.128.100	100%	69,85 %	24,00	95.873.150	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah	60,00	1.240.092.700,00	12,00	781.278.397	12,00	bul an	800.000.000	12,00	799.930.725	100%	99,99 %	24,00	1.581.209.122	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	20	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	aktifitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	60,00	29.939.380,90	12,00	3.580.000.000	12,00	bul an	3.975.490.000	12,00	3.949.000.000	100%	99,33 %	24,00	7.529.000.000	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	89	Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	tersedianya sistem komputerisasi daftar gaji PNS	60,00	158.941.231,90	12,00	127.256.908	12,00	bul an	107.018.000	12,00	94.967.000	100%	88,74 %	24,00	222.223.908	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	97	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	0	-	0	270.112.720,00	12,00	bul an	267.000.000	12,00	264.208.423	100%	98,95 %	12,00	534.321.143	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	110	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka	terlaksananya operasional rutin kantor	0	-	0	516.505.973,00	12,00	bul an	577.343.000	12,00	509.101.230	100%	88,18 %	12,00	1.025.607.203	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	111	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	terlaksananya operasional rutin kantor	0	-	0	-	12,00	bul an	469.217.000	12,00	389.758.500	100%	83,07 %	12,00	389.758.500	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	112	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Barat	terlaksananya operasional rutin kantor	0	-	0	-	12,00	bul an	469.783.000	12,00	319.848.337	100%	68,08 %	12,00	319.848.337	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	113	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	terlaksananya operasional rutin kantor	0	-	0	-	12,00	bul an	461.530.000	12,00	436.220.638	100%	94,52 %	12,00	436.220.638	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	114	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung	terlaksananya operasional rutin kantor UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung	0	-	0	559.177.393,00	12,00	bul an	556.578.000	12,00	538.362.450	100%	96,73 %	12,00	1.097.539.843	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022

20	06	01	01	115	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitang Timur	terlaksananya operasional rutin kantor UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitang Timur	0	-	0	-	12,00	bulan	503.155.000	12,00	471.877.297	100%	93,78%	12,00	471.877.297	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	120	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang	terlaksananya operasional rutin kantor UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang	0	-	0	595.528.560,00	12,00	bulan	573.228.000	12,00	548.781.100	100%	95,74%	12,00	1.144.309.660	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	01	127	Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD	Terlaksananya pengelolaan kehumasan DPPKAD	0	-	0	173.402.662,00	12,00	bulan	118.315.000	12,00	110.933.532	100%	93,76%	12,00	284.336.194	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100,00	2.305.225.450	73,15	5.109.031.048	583		3.729.340.000	583	3.266.218.125	100,00%	87,58%	656,15	8.375.249.173	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Pembuatan ruang rapat kepala DPPKAD	tersedianya ruangan rapat Kepala DPPKAD	0	0	0	141.273.550	0	0	-	-	-	0%	0,00%	-	141.273.550	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	02	74	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	0		92,40	1.313.855.425	399	unit	972.867.000	399,00	900.731.600	100%	92,59%	491,40	2.214.587.025	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	02	83	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor	0		0	1.401.708.423	148	unit	1.333.600.000	148,00	1.255.334.725	100%	94,13%	148,00	2.657.043.148	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	02	156	Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60	1.131.083.800	12,00	896.629.000	12	bulan	792.000.000	12,00	644.470.000	100%	81,37%	24,00	1.541.099.000	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	02	164	Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	60	1.174.141.650	12,00	608.001.650	12	bulan	522.380.000	12,00	367.853.800	100%	70,42%	24,00	975.855.450	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	02	256	Pemeliharaan/Rutin Berkala Taman, tempat parkir dan halaman kantor	terpeliharanya Taman, tempat parkir dan halaman kantor	0	-	-	306.465.000	12	bulan	108.493.000	12,00	97.828.000	100%	90,17%	12,00	404.293.000	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Pembangunan Tempat Parkir, pagar dan sumur bor pada UPTD	tersedianya tempat parkir, pagar dan sumur bor pada UPTD	0		-	441.098.000	0	0	-	-	-	0%	0,00%	-	441.098.000	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	3.083.585.780	433,66	3.811.082.788	573		3.700.335.000	573	3.350.121.978	100%	90,54%	1.007	7.161.204.766	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	Penetapan Perda dan Pergub tentang APBD 2017	100,00	1.089.000.000	91,97	657.605.180,00	2,00	peraturan	674.220.000	2,00	652.643.838	100%	96,80%	93,97	1.310.249.018	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan APBD	Penetapan Perda dan Pergub tentang Perubahan APBD 2017				557.498.200,00	2,00	peraturan	675.860.000	2,00	670.164.820	100%	99,16%	2,00	1.227.663.020	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022

20	06	01	17	15	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017			1,00	236.048.900,00	2,00	peraturan	256.320.000	2,00	244.674.716	100%	95,46%	3,00	480.723.616	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Penetapan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017			-	284.833.010,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	284.833.010	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17	28	Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	7	482.402.250,00	7,00	550.922.436	7,00	UP T Ka b/k ota	645.570.000,00	7,00	523.205.200	100%	81,05%	14,00	1.074.127.636	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17	96	semula "Peningkatan fungsi Pelayanan Aplikasi SIPKD" menjadi Peningkatan Fungsi Jaringan Aplikasi SIMDA"	Terlaksananya Operasional Aplikasi SIPKD Modul Core	60,00	550.000.000	12,00	717.242.213,00	12,00	bulan	596.712.500	12,00	512.757.428	100%	85,93%	24,00	1.229.999.641	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17	42	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	Meningkatnya kinerja Bendahara pengeluaran dan PPK SKPD dalam pencairan dana dan penggunaan dana	100,00	221.441.880	92,84	115.554.643,00	120,00	orang	138.559.000	120,00	137.629.000	100%	99,33%	212,84	253.183.643	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17	49	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017	Tersusunnya rencana kerja dan anggaran SKPD yang mengacu pada ketentuan MENDAGRI	100,00	175.021.000,00	88,71	-	100,00		123.970.000	100,00	114.329.530	100%	92,22%	188,71	114.329.530	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D	Terpeliharanya arsip SP2D yang diterbitkan BUD /Kuasa BUD beserta dokumen pendukungnya	-	-	70,48	174.628.421,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	70,48	174.628.421	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Penyusunan Pergub tentang standar sarana dan prasarana pemerintah daerah	tersusunnya Peraturan Gubernur tentang standar sarana dan prasarana pemerintah	-	-	-	81.597.078,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	81.597.078	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Pengalihan asset milik pemerintah 7 kab/kota ke Provinsi Kep Bangka Belitung	terlaksananya proses /tahapan pengalihan asset milik kab/kota ke Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	13	173.699.432,00			-	-	-	0,00%	0,00%	13,00	173.699.432	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17	99	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya informasi keuangan Semester	100	70.720.650,00	63,06	43.184.700	100,00		49.855.000,00	100,0	31.855.000	100%	0,64	163,06	75.039.700	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	17	100	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	100	495.000.000,00	59,47	218.268.575	28,00	orang	228.908.000,00	28,00	179.121.682	100%	78,25%	87,47	397.390.257	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022

20	06	01	17	101	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Terlaksananya Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak				-	100,00		42.853.000	100,00	26.978.300	100%	62,96%	100,00	26.978.300	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
06	01	01	17	105	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA	Terlaksananya Operasional Aplikasi SIMDA	-	-	-	-	100,00	%	267.507.500	100,00	256.762.464	100%	95,98%	100,00	256.762.464	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	18		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota	100,00	284.558.560	48,93	417.514.911	21		453.347.800	21	420.227.200	100,00%	92,69%	69,93	837.742.111	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	18	01	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD TA 2017	Keputusan Gubernur tentang evaluasi raperda dan Raperkada tentang APBD 2017	100,00	192.500.000	85,88	150.346.100	7,00	Kab/Kota	257.435.000	7,00	230.222.000	100%	89,43%	92,88	380.568.100	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD TA 2016	Keputusan Gubernur tentang evaluasi raperda dan Raperkada tentang PAPBD 2016				182.581.951	7,00	Keputusan	-	-	-	-	0,00%	-	182.581.951	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	05	01	18	08	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Raperda tentang Pertanggung jawaban APBD	7,00	92.058.560	7,00	84.586.860	7,00	Kab/Kota	68.465.000	7,00	68.465.000	100%	100,00%	14,00	153.051.860	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01		10	Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	53,89	-	7,00	Kab/Kota	127.447.800	7,00	121.540.200	100%	95,36	-	121.540.200	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	87		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	persentase aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya	-	137.325.266	-	743.010.576	107		912.012.200	107	757.980.109	100,00%	83,11%	107,00	1.500.990.685	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Pembinaan teknis bendahara/penyimpan barang dan pengurus barang	terlaksananya Pembinaan teknis bendahara/penyimpan barang dan pengurus barang	-		100,00	123.064.194,00	-		-	-	-	0%	0,00%	100,00	123.064.194	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	87	04	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	tersusunnya dokumen harga satuan barang dan jasa (HSBJ) tahun 2017	100,00	137.325.266		235.654.000,00	1,00	keputusan	207.351.000	1,00	202.405.900	100%	97,62%	1,00	438.059.900	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	87	05	Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penghapusan barang-barang inventaris milik pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-			-	2,00	Keputusan	273.821.500	2,00	229.029.799	100%	83,64	2,00	229.029.799	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	87	06	Penyusunan laporan barang milik daerah	Kartu inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI) dan Daftar Mutasi Barang Tahun 2015 serta Laporan Barnag semester pertama tahun 2016	-			167.688.000,00	2,00	laporan	217.615.000	2,00	154.643.200	100%	71,06%	2,00	322.331.200	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01			Penyusunan perda dan pergub tentang pengelolaan barang milik daerah	Tersusunnya Pergub Barang Milik Daerah	-			114.295.877,00			-	-	-	0%	0,00%	-	114.295.877	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022

20	06	01	87	09	Pengamanan dan Pengawasan barang milik daerah	Pengamanan dan pengawasan terhadap Barang Milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-			102.308.505,00	1,00	Laporan	112.731.000	1,00	83.417.010	100%	74,00	1,00	185.725.515	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	87	10	Sosialisasi Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		-		-		100,00		63.591.200	100,00	56.991.200	100%	89,62	100,00	56.991.200	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	87	14	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD)		-		-		1,00	Buku	36.902.500	1,00	31.493.000	100%	85,34	1,00	31.493.000	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	12	22	Peningkatan Pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain	Persentase Pencapaian penerimaan pajak daerah dan retribusi serta pendapatan lain-lain	100,00	-	8,75	1.198.121.894	241		1.426.920.000	182	1.296.999.869	76%	90,90%	190,75	2.495.121.763	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	12	21	Peningkatan Fungsi Samsat Corner		-	-		51.771.760,00	12,00	bulan	77.000.000	12,00	73.628.336	100%	95,62%	12,00	125.400.096	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	12	24	Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait	terlaksananya Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait	-	-			2,00	Dokumen	61.940.000	2,00	47.383.400	100%	76,50%	2,00	47.383.400	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Sosialisasi Perda Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi perda pajak daerah			8,00	61.413.500,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	8,00	61.413.500	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	12	22	Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem informasi Pajak Daerah	Teroperasinya dan terpeliharanya Sistem informasi Pajak Daerah			12,00	275.194.502,00	12,00	bulan	451.800.000	12,00	387.748.335	100%	85,82%	24,00	662.942.837	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	12	23	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	Terlaksananya operasional Samsat Keliling	-		12,00	294.604.922,00	12,00	bulan	440.040.000	12,00	428.928.700	100%	97,47%	24,00	723.533.622	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	12	26	Penyusunan Pergub tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Tersusunnya Pergub tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	-		3,00	71.156.300,00	3,00	peraturan	88.200.000	3,00	79.393.540	100,00	90,02%	6,00	150.549.840	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	12	27	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pendapatan lain-lain	Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pendapatan lain-lain	-			344.834.370,00	100,00		288.170.000	100,00	260.967.558	100%	90,56%	100,00	605.801.928	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
20	06	01	12	28	Rapat kerja retribusi daerah dan pendapatan lain-lain	Terlaksananya Rakernis Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain	-			31.150.000,00	100,00		19.770.000	100,00	18.950.000	100%	95,85%	100,00	50.100.000	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
					Penyusunan pergub tentang lain-lain pendapatan yang sah	Tersusunnya pergub tentang lain-lain pendapatan yang sah	-			67.996.540,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	-	67.996.540	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022	Telah berubah indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022
							100,00	16.216.663.992,98	81,39	22.000.691.698,00	1,801,00		23.003.072.000,00	1,801	20.985.984.662,00	100,00	91,23%	1.882	42.986.676.360,00		

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam mengambil Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mebukukan pendapatan dan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2017 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah **merealisasikan 108.80 % target pendapatan pajak daerah** yaitu sebesar Rp. 629.136.457.212,39 (Enam ratus dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu koma tiga puluh sembilan rupiah) dari target sebesar Rp. 578.237.062.209,57 (Lima ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh dua ribu dua ratus sembilan koma lima puluh tujuh rupiah). **Realisasi tahun 2017 meningkat jika dibandingkan pada tahun 2016 yang terealisasi hanya sebesar 99.77 %**, yaitu sebesar Rp. 507.983.460.531,72 (lima ratus tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah) dari target sebesar Rp. 509.130.376.289,67 (Lima ratus sembilan milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah).

Pendapatan Pajak Daerah ini menyumbang kontribusi sebesar 88.61% pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 710.029.190.146,58 (Tujuh ratus sepuluh milyar dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh enam koma lima puluh delapan rupiah) dan 27.98 % pada realisasi total penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.248.503.104.535.58 (dua trilyun dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus tiga juta seratus empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima puluh delapan rupiah).

Sedangkan realisasi penerimaan pendapatan Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masing masing-masing memberikan **sebesar 0.77 %, 0.75 % dan 9.88% pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)**.

Diagram berikut ini menggambarkan realisasi pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 :

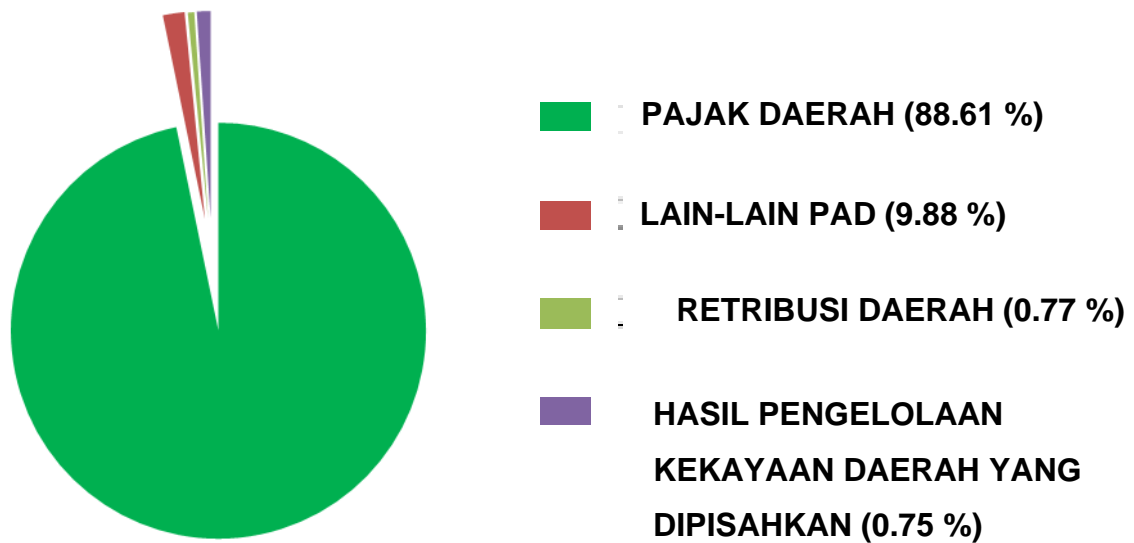


DIAGRAM II.1 KOMPOSISI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2017

Kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bila dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pada tahun 2017, Kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 27.98 % dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 26.06 % memberikan gambaran bahwa tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Sedangkan ketergantungan keuangan daerah menurun pada tahun 2017 yaitu sebesar 68.37 % dibandingkan tahun 2016 sebesar 73.94 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin tinggi tingkat kemampuan fiskal daerah dengan berkurangnya ketergantungan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Tabel Berikut menyajikan realisasi seluruh penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 27.98 % dan Dana Perimbangan sebesar 68.37 %.

TABEL I.1 REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN DAN PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	PERSENTASE TERHADAP PENDAPATAN
4.1	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	737.192.092.935,16	710.029.190.146,58	96,32%	31,58%
4.1.1	PAJAK DAERAH	578.237.062.209,57	629.136.457.212,39	108,80%	27,98%
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor	203.126.491.000,00	197.962.271.163,00	97,46%	8,80%
4.1.1.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	129.552.628.500,00	169.320.289.651,00	130,70%	7,53%
4.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	172.380.267.391,57	182.118.099.275,00	105,65%	8,10%
4.1.1.06	Pajak Air Permukaan	5.900.000.000,00	7.541.444.254,39	127,82%	0,34%
4.1.1.07	Pajak Rokok	67.277.675.318,00	72.194.352.869,00	107,31%	3,21%
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	19.409.736.914,87	5.434.540.818,00	28,00%	0,24%
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.842.048.972,00	1.708.723.498,00	13,31%	0,08%

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN DAN PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	PERSENTASE TERHADAP PENDAPATAN
4.1.2.02	Retribusi jasa usaha	3.817.687.942,87	2.924.907.320,00	76,61%	0,13%
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.750.000.000,00	800.910.000,00	29,12%	0,04%
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.500.000.000,00	5.306.417.427,05	62,43%	0,24%
4.1.3.01	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada PEMDA (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/ Swasta	8.500.000.000,00	5.306.417.427,05	62,43%	0,24%
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	131.045.293.810,72	70.151.774.689,14	53,53%	3,12%
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5.748.495.280,00	220.486.950,00	3,84%	0,01%
4.1.4.02	Jasa Giro	20.087.756.227,00	6.237.648.837,26	31,05%	0,28%
4.1.4.03	Pendapatan Bunga	42.458.149.093,00	6.827.671.605,00	16,08%	0,30%
4.1.4.04	Tuntutan ganti Rugi	316.800.061,00	132.011.211,80	41,67%	0,01%
4.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.994.734.797,00	70.426.876,00	2,35%	0,00%
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	9.424.444.275,00	7.865.868.006,00	83,46%	0,35%
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	41.625.575.996,32	36.645.737.693,25	88,04%	1,63%
4.1.4.15	Lain-lain Penerimaan	3.598.392.563,67	1.861.996.406,00	51,75%	0,08%
4.1.4.16	Pendapatan dari BLUD	4.790.945.517,73	10.289.927.103,83	214,78%	0,46%
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.619.104.922.550,00	1.537.241.446.289,00	94,94%	68,37%
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	175.828.126.000,00	120.836.218.678,00	68,72%	5,37%
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	55.808.099.000,00	39.043.006.764,00	69,96%	1,74%
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumbewr Daya Alam	120.020.027.000,00	81.793.211.914,00	68,15%	3,64%
4.2.2	DANA ALOKASI UMUM	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	99,26%	43,60%
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	99,26%	43,60%
4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	455.719.877.000,00	436.107.913.611,00	95,70%	19,40%
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	455.719.877.000,00	436.107.913.611,00	95,70%	19,40%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11%	0,05%
1.3.4	HIBAH	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11%	0,05%
1.3.4.01	Dana Darurat	-	-	0,00%	0,00%
1.3.4.02	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	0,00%	0,00%
1.3.4.03	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	0,00%	0,00%
1.3.4.04	Sumbangan Pihak Ketiga	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11%	0,05%
1.3.4.05	Pendeapatan Lainnya	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH		2.386.297.015.485,16	2.248.503.104.535,58	94,23%	100,00%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 telah menyelaraskan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis 2014-2019 yaitu :

- 1. Penerimaan pajak negara yang optimal ;
- 2. Terjaganya defisit anggaran ;
- 3. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.

Permasalahan penting yang telah diidentifikasi pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Tidak tercapainya target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2. Belum maksimalnya capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3. Belum maksimalnya Pelayanan kepada masyarakat

Seiring dengan pergantian Kepemimpinan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berakhirnya masa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017, maka pada tahun 2019 telah menyelaraskan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- 1. Kurang optimalnya kualitas pelayanan public;
- 2. Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah melalui PAD;
- 3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
- 4. Belum maksimalnya sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dengan dokumen perencanaan pembangunan;
- 5. Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 telah ditetapkan sasaran strategis/Indikator kinerja Utama yang akan didukung oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal RPJMD	Taget 2019	Kondisi Akhir RPJMD
1	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	5.2	5.65	5.80
2	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP
3	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	NA	78	90

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 telah ditetapkan Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari beberapa program pembangunan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa program yang berbeda pendanaan indikatifnya dan belum memasukkan indikator kinerja yang ingin dicapai, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mereview Program Prioritas Daerah tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel T-C.31.

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah		Prosentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah		2.506.533.250	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Provinsi Kep Bangka Belitung	Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah	4.78%	5.544.266.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
								Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	79,00		Penyesuaian Perubahan Cascading
								Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik jasa lainnya pada Badan Keuangan Daerah	81.00		Penyesuaian Perubahan Cascading
2	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah		Prosentase Kontribusi Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain-Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah		1.511.430.825,00	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Provinsi Kep Bangka Belitung	Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	5.03 %	124.399.250,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
3	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan		Prosentase Bendahara Perangkat Daerah Yang Berkompeten		753.793.700	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan	Provinsi Kep Bangka Belitung	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100.00%	139.628.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading

4	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan PD Yang Sesuai Dengan SAP		1.520.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan	Provinsi Kep Bangka Belitung	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100,00%	317.128.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
5	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah		Nilai Aset Daerah Yang Dapat Diyakini Kewajarannya		2.509.318.850	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Provinsi Kep Bangka Belitung	persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan	100.00 %	441.684.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
			Peningkatan Persentase Kontribusi Kemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD		396.580.000			persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	0.28 %		Penyesuaian Perubahan Cascading
6	Program Penganggaran Pembangunan Daerah		Tingkat Kesesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Dan Jadwal Penetapan Apbd Dan Perubahan Apbd (Ket: 3 = Sesuai, 2 = Kurang Sesuai, 1 = Tidak Sesuai)		2.550.000.000	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Provinsi Kep Bangka Belitung	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi	100.00 %	1.057.725.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
			Prosentase Kesesuain Antara RAPBD Dengan Dokumen KUA-PPAS		2.310.192.500			Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100.00 %		Penyesuaian Perubahan Cascading

2.4. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terkait dengan usulan masyarakat terhadap Program dan Kegiatan yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diakomodir melalui kuisisioner yang diisi oleh masyarakat pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota.

Masukan masyarakat akan diformulasikan pada kegiatan prioritas yang diusulkan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Tabel berikut merupakan formulasi usulan/masyarakat terhadap pelayanan oleh UPT Badan Kepulauan Bangka Belitung :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	7 Kabupaten /Kota	Peningkatan Pelayanan pada Loker khusus untuk pengesahan STNK 1 tahun, pada seluruh UPT Kabupaten/Kota diusulkan melalui masukan pada pengisian kuisisioner pengukuran IKM
1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	2 Kabupaten /Kota	Peningkatan Pelayanan Samsat Definitif pada UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penutup kabinet kerja sehingga tema dan prioritas nasional RKP Tahun 2019 lebih terfokus. Prioritas nasional di bidang ekonomi masuk dalam Prioritas Nasional 3, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sehubungan telah diubahnya beberapa indikator dalam Rancangan Perubahan Renstra Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka terdapat beberapa perubahan yang ingin dilakukan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator tujuan yang ingin dicapai adalah Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan yang ingin dicapai adalah Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator tujuan yang ingin dicapai adalah Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD;
2. Meningkatkan kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD;
3. Meningkatkan kualitas Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Prosentase Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan

4. Meningkatkan kewajaran nilai asset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya;
5. Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah.

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam masa 2017-2022 :

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH / INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	32,08%	Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	87,32%
2.				Meningkatkan kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	12,68%
3.	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Meningkatkan kualitas Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	Prosentase Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	100,00 %
4.				Meningkatkan kewajaran nilai aset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	4.929.403.053.587,66
5.				Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100,00 %
6.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78,00	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	80,25

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 telah ditetapkan Visi Pembangunan dalam RPJMD yang mendukung Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih, Yaitu : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***

Dalam Rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yang juga telah ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD periode yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam kebijakan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung Misi 1 dan Misi 5 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

Misi 1 : “Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Adapun salah satu tujuan yang ingin dicapai dari Misi 1 ini adalah meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat, dengan indikator tujuan Pengeluaran pemerintah perkapita.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator Persentase pertumbuhan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB.

Misi 5 “ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Misi 5 ini adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Terwujudnya Pembangunan pembangunan demokrasi, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas
4. Peningkatan Kebebasan sipil masyarakat
5. Peningkatan hak-hak politik masyarakat
6. Peningkatan peran lembaga demokrasi

Adapun target yang ingin dicapai oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 telah diuraikan pada Bab II.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan Urusan Penunjang Program Pemerintah Dalam Bidang Keuangan akan melaksanakan 1 (satu) Program non urusan yaitu Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah yang akan mengakomodir 6 (enam) kegiatan dengan total pendanaan sebesar Rp. 17.952.638.519,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan 6 (enam) Program Pembangunan Prioritas yang akan mengakomodir 52 (lima puluh dua) kegiatan yang membutuhkan dana sebesar Rp. 20.251.902.375,00 (Dua puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) . Total Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar Rp. 38.204.540.894,00 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Tabel berikut memberikan gambaran Rumusan Program dan Kegiatan Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70, CC=50-60, C=40-50); Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	74,00; 100 %	12.749.698.157,00			4 nilai;100 %	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Persentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	9.873.626.807,00	-		100%	12.724.369.518

0	0	8	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	3 dokumen	1.725.000,00	-		3 dokumen	49.600.000
0	0	8	4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SKPD	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat	28 orang	168.391.000,00	-		30 orang	330.750.000
0	0	8	5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	2.687.654.550,00	-		100%	5.160.462.808
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 laporan	3.300.800,00	-		7 laporan	49.600.000
0	0	8	8	Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda	Provinsi	Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA	12 bulan	15.000.000,00	-		12 bulan	153.300.000
4												
4	34			Keuangan								

4	34	15		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah		Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah; Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah ; Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik jasa lainnya pada Badan Keuangan Daerah	4,78%	5.544.266.000,00			24,62 %;3 NILAI	
							79.5					
							81.00					
4	34	15	1	Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	Luar Daerah, Provinsi	Tercapainya realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB, PAP, PBBKB dan Pajak Rokok	673.279.876.467 Rp	568.544.000,00	-		740.607.864.113 Rp	832.305.125
4	34	15	2	Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	SKPD	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	12 Bulan	280.525.000,00	-		12 Bulan	855.040.650
4	34	15	3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG)	Provinsi	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	12 Bulan	190.110.000,00	-		12 Bulan	628.893.618

4	34	15	4	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Pangkal Pinang	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	12 Bulan	38.000.000,00	-		12 Bulan	102.089.231
4	34	15	5	Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	2 kali	17.800.000,00	-		2 kali	125.034.881
4	34	15	6	Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	0	0	-		0	0
4	34	15	7	Sosialisasi Pajak Daerah	Provinsi	jumlah peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah jumlah hari pameran yang diikuti Jumlah spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik	280 orang 7 hari 30 kali	187.813.250,00	-		280 orang 14 hari 30 kali	693.375.000
4	34	15	9	Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang	Jumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	12 bulan	710.774.000,00	-		12 bulan	1.100.000.000

4	34	15	10	Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	Bangka	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	12 bulan	706.489.750,00	-		12 bulan	986.591.613
4	34	15	11	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	Belitung	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	12 bulan	784.830.000,00	-		12 bulan	1.017.000.000
4	34	15	12	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	12 bulan	442.321.000,00	-		12 bulan	603.531.000
4	34	15	13	Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat	Pangkal PinangJumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	12 bulan	490.490.000,00	-		12 bulan	600.000.000
4	34	15	14	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	12 bulan	541.425.000,00	-		12 bulan	682.137.500

4	34	15	15	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	12 bulan	585.144.000,00	-		12 bulan	853.012.500
4	34	15	24	Penyusunan regulasi/kebijakan bidang tata kelola pajak daerah	Pangkalpinang, SKPD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	3 Pergub	0				
4	34	16		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah		Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	5.03 %	124.399.250,00			75,38 %	
4	34	16	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi	jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	45 instansi	19.570.000,00	-		45 instansi	484.939.590
4	34	16	2	Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	10 kali	35.729.000,00	-		12 kali	69.610.448
4	34	16	3	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1 kali	27.499.000,00	-		1 kali	205.700.000

4	34	16	5	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	SKPD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	0	0	-		0 PERDA	0
4	34	16	7	Pembelajaran pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ke daerah lain	Luar Daerah	Jumlah kunjungan dalam rangka Pelaksanaan Pembelajaran pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ke daerah lain	0 kali	0	-		0 kali	0
4	34	16	8	Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	Provinsi	Laporan hasil pengawasan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Laporan	32.576.250,00	-		3.221.562.958.146,77 Rp	600.000.000
4	34	16	10	Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	Pangkalpinang	Jumlah Peraturan Tentang Regulasi/Kebijakan Bidang tata Kelola retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah	1 peraturan	9.025.000,00				
4	34	18		Program Penganggaran Pembangunan Daerah		Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi; Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1.057.725.000,00			3 nilai;100 %	

4	34	18	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	4 rancangan peraturan	270.000.000,00	-		4 rancangan peraturan	1.783.558.150
4	34	18	3	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	200 orang	157.500.000,00	-		200 orang	400.000.000
4	34	18	6	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	14 keputusan	48.250.000,00	-		7 keputusan	425.000.000
4	34	18	7	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD	0	0	-		7 keputusan	400.000.000
4	34	18	8	Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 kali	23.200.000,00	-		8 kali	300.000.000
4	34	18	9	Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA-PD/PPKD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Rapergub tentang pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD	1 rancangan peraturan	0	-		1 rancangan peraturan	400.000.000
4	34	18	10	Penyusunan Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 rancangan peraturan	176.925.000,00	-		0 rancangan peraturan	0

4	34	18	12	Peningkatan fungsi pelayanan aplikasi SIMDA	Provinsi	terlaksananya asistensi aplikasi SIMDA	0	0	-		3 modul	315.000.000
4	34	18	12	Penyusunan KUA dan PPAS	SKPD	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4 DOKUMEN	287.900.000,00	-		4 DOKUMEN	757.653.600
4	34	18	15	Penyusunan regulasi/kebijakan bidang anggaran	SKPD, Pangkalpinang	Jumlah Peraturan Tentang regulasi / kebijakan bidang anggaran	1 peraturan	93.950.000,00				
4	34	19		Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan		Prosentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	317.128.000,00			100%	
4	34	19	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 rancangan peraturan	121.568.000,00	-		1 rancangan peraturan	390.000.000
4	34	19	2	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	12 bulan layanan	70.285.000,00	-		12 bulan layanan	690.000.000
4	34	19	3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 laporan	72.100.000,00	-		1 laporan	140.000.000

4	34	19	5	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	7 keputusan	19.525.000,00	-		7 keputusan	160.000.000
4	34	19	6	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	33.650.000,00	-		1 dokumen	240.000.000
4	34	20		Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah		persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan; persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	100 % 0.27 %	441.684.000,00			5.244.499.204.715,99 Rp;0,36 %	

4	34	20	1	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100 orang	71.540.000,00	-		100 orang	264.000.000
4	34	20	2	Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah pergub tentang pengelolaan barang milik daerah	0	0	-		1 peraturan	222.000.000
4	34	20	3	Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	-		100 orang	144.000.000
4	34	20	4	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	-		25 orang	265.000.000
4	34	20	5	Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	2 laporan	2.204.000,00	-		2 laporan	225.850.735

4	34	20	6	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 keputusan	24.500.000,00	-		1 keputusan	275.000.000
4	34	20	7	Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 keputusan	113.720.000,00	-		1 keputusan	135.000.000
4	34	20	8	Penyusunan laporan barang milik daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 laporan	19.310.000,00	-		2 laporan	190.000.000
4	34	20	9	Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Provinsi	Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 sertifikat bidang tanah	49.210.000,00	-		20 sertifikat bidang tanah	350.000.000
4	34	20	10	Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan		Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	1 keputusan	4.750.000,00	-		1 keputusan	80.000.000
4	34	20	11	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	SKPD, Pangkal Pinang	Tersedianya dan beroperasinya aplikasi sistem SIMDA ter-update	12 bulan	29.700.000,00	-		1 laporan	480.000.000

4	34	20	12	Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Dokumen data permasalahan dan pemecahan masalah asset di tingkat Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0		-		1 dokumen	140.000.000
4	34	20	13	Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga	1 dokumen	126.750.000,00	-		1 dokumen	287.738.000
4	34	21		Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi		prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100%	139.628.000,00			100%	
4	34	21	1	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	120 orang	65.174.000,00	-		120 orang	369.076.620
4	34	21	3	Sosialisasi Penata usahaan Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Peserta sosialisasi	100 orang	60.054.000,00	-		100 orang	145.200.000
4	34	21	4	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan	4 dokumen	14.400.000,00	-		4 dokumen	169.400.000

4	34	21	5	Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	12 bulan	0	-		12 bulan	145.496.450
					TOTAL			20.374.528.407				39.301.568.649

4.2 Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

Memenuhi amanat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat dokumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai kewajiban daerah untuk memenuhi target dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan RKA-PD, .

Adapun target dalam PPRG Tahun Anggaran 2019 yang ingin dicapai :

N O	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA PPRG	PAGU
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70, CC=50-60, C=40-50); Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	74,00; 100 %		
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat	28 orang	Meningkatkan partisipasi peserta perempuan terhadap peserta laki-laki menjadi 45 % : 55 %	168.391.000,00
A	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah; Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah ; Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik jasa lainnya pada Badan Keuangan Daerah	4,78% 79.5 81.00		
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG)	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	12 Bulan	Peningkatan Intensitas kunjungan layanan Samsat Keliling pada daerah potensial menjadi sebesar 11.00	190.110.000,00
B	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi	100		
		Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100		
1	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG)	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	200 orang	Meningkatkan partisipasi peserta perempuan terhadap peserta laki-laki menjadi 45 % : 55 %	157.500.000,00
C	Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100		
1	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	120 orang	Meningkatkan partisipasi peserta perempuan terhadap peserta laki-laki menjadi 50 % : 50 %	65.174.000,00

BAB IV

PENUTUP

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan ditetapkan dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja ini prinsip efektif, efisiensi, akuntabel, transparan akan diutamakan sesuai dengan pagu indikatif yang tersedia. Apabila pagu indikatif yang tersedia tidak cukup untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, maka akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pelaksana kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Pangkalpinang, September 2018

KEPALA BADAN,

FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004